

BAB I

PENDAHULUAN

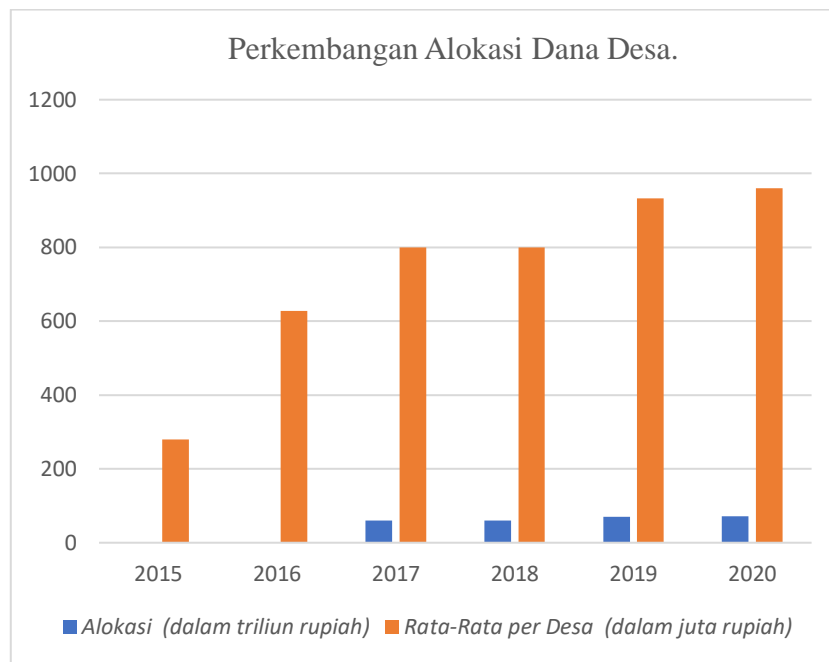
1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan suatu subjek pembangunan, yang digerakan masyarakat guna melaksanakan pembangunan untuk taraf hidup yang lebih baik. Di Indonesia sendiri hampir semua penduduknya bertempat tinggal dipedesaan. Dengan jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan aset melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Penyaluran Sumber Daya Desa (ADD) bertujuan untuk mendorong otonomi desa guna memperkuat pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintah kabupaten dan pemerintah kabupaten berperan sebagai perantara yang mendukung masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung proses pembangunan di setiap desa adalah dukungan pembiayaan, yaitu perolehan Dana Desa (ADD).

Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada masing-masing desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan desa, termasuk pengelolaan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. (UU Desa) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PP Dana Desa). Antara tahun 2015 hingga 2020, dana desa yang disalurkan melalui APBN mencapai Rp328,07 triliun. Dari segi ekonomi, salah satu tujuan UU Desa (yang memaksa dana desa memperoleh APBN) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik

bagi masyarakat desa guna mempercepat tercapainya kesejahteraan umum dan memajukan perekonomian desa. masyarakat dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.



Sumber: DJPK, 2020 diolah

Gambar 1.1

Perkembangan Alokasi dana desa

Jika dilihat dari penyebaran grafik Dana Desa yang disalurkan setiap tahunnya. Apabila Berdasarkan data kementerian keuangan, dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dana desa yang dikeluarkan pemerintah terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan pentingnya percepatan pembangunan desa yang menjadi prioritas

pemerintah. Diharapkan dengan bertambahnya anggaran dana desa, pemerintah dapat meningkatkan produktivitasnya sekaligus meningkatkan kualitas untuk kemajuan masyarakat desa agar semakin baik.

Tabel 1. 1

Alokasi dana desa per Tahun 2015

No.	Provinsi	Jumlah Desa	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bagian Hasil PDRB	Jumlah	Jumlah Dana Per Desa
Dalam Satuan Rupiah							
1	Aceh	6474	1.70 T	1.32 T	75.96 M	3.10 T	497.77 J
2	Sumatera Utara	5389	1.46 T	1.75 T	142.95 M	3.35 T	622.21 J
3	Sumatera Barat	880	267.03 M	855.5 M	28.56 M	1.15 T	1.30 M
4	Riau	1592	445.65 M	1.59 T	46.71 M	2.08 T	1.30 M
5	Jambi	1398	381.56 M	741.24 M	24.75 M	1.14 T	820.85 J
6	Sumatera Selatan	2817	775.04 M	1.39 T	47.34 M	2.22 T	788 J
7	Bengkulu	1341	362.96 M	450.29 M	9.86 M	823.12 M	613.81 J
8	Lampung	2435	684.73 M	946.6 M	29.17 M	1.66 T	681.93 J
9	Jawa Barat	5319	1.59 T	2.69 T	545.19 M	4.82 T	907.55 J
10	Jawa Tengah	7809	2.23 T	2.89 T	205.68 M	5.32 T	682.08 J
11	DI Yogyakarta	392	128.08 M	359.41M	59.08 M	546.57M	1.39 M
12	Jawa Timur	7723	2.21 T	3.44 T	378.67 M	6.03 T	781.04 J
13	Kalimantan Barat	1908	537.07 M	892.36 M	39.6 M	1.46 T	769.93 J
14	Kalimantan Tengah	1434	403.35 M	900.46 M	23.37 M	1.4 T	925.51 J
15	Kalimantan Selatan	1864	501.12 M	819.51 M	28.17 M	1.3 T	723.6 J
16	Kalimantan Timur	833	240.54 M	1.54 T	23.28 M	1.3 T	2.17 M
17	Sulawesi Utara	1490	402.55 M	527.36 M	15.39 M	1.8 T	634.43 J
18	Sulawesi Tengah	1839	500.3 M	711.55 M	26.18 M	945 M	673.21 J
19	Sulawesi Selatan	2253	635.35 M	1.32 T	96.44 M	2.05 T	913.03 J
20	Sulawesi Tenggara	1820	496.08 M	366.29 M	15.86 M	1.14 T	629.24 J
21	Bali	636	185.43 M	554.6 M	368.96 M	1.10 T	1.74 M
22	NTB	995	301.79 M	599.99 M	45.24 M	947.03 M	951.78 J
23	NTT	2950	812.87 M	1.03 T	33.31 M	1.88 T	638.4 J
24	Maluku	1191	334 M	596.79 M	20.79 M	951.58 M	798.98 J
25	Papua	5118	1.43 T	2.11 T	53 M	3.60 T	703.53 J

No.	Provinsi	Jumlah Desa	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bagian Hasil PDRB	Jumlah	Jumlah Dana Per Desa
26	Maluku Utara	1063	291.07 M	439.37 M	16.81 M	747.2 M	702.97 J
27	Banten	1238	352.52 M	468.81 M	155.46 M	976.78 M	789 J
28	Bangka Belitung	309	91.93 M	313.47 M	19.96 M	425.35 M	1.37 M
29	Gorontalo	657	179.96 M	233.65 M	5.57 M	419.17 M	638.01 J
30	Kepulauan Riau	275	79.2 M	389.73 M	41.40 M	510.33 M	1.85 M
31	Papua Barat	1628	449.33 M	732.8 M	11.59 M	1.19 T	733.24 J
32	Sulawesi Barat	576	162.02 M	304.42 M	13.54 M	479.98 M	833.3 J
33	Kalimantan Utara	447	129.87 M	257.78 M	2.44 M	390.10 M	872.71 J
	Jumlah	74093	20.77 T	33.83 T	2.65 T	57.25 T	772 M

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2016

Tabel 1.2 Alokasi dana desa 2016 1

No	Provinsi	Jumlah Desa	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bagian Hasil PDRB	Jumlah	Jumlah Dana Per Desa
1	Aceh	6474	3.82 T	1.38 T	66.69 M	5.28 T	815.94 J
2	Sumatera Utara	5418	3.29 T	1.85 T	140.71 M	5.29 T	976.93 J
3	Sumatera Barat	880	598.63 M	917.06 M	27.56 M	1.54 T	1.75 M
4	Riau	1592	999.27 M	1.32 T	40.66 M	2.36 T	1.48 M
5	Jambi	1399	856.77 M	713.44 M	25.65 M	1.59 T	1.14 M
6	Sumatera Selatan	2859	1.78 T	1.42 T	59.21 M	3.26 T	1.14 M
7	Bengkulu	1341	813.89 M	483 M	11.17 M	1.3 T	975.44 J
8	Lampung	2435	1.53 T	1.02 M	29.53 M	2.58 T	1.06 M
9	Jawa Barat	5319	3.56 T	2.75 T	617.12 M	6.94 T	1.3 M
10	Jawa Tengah	7809	5 T	3.13 T	233.61 M	8.37 T	1.07 M
11	DI Yogyakarta	392	287.69 M	383.64 M	64.52 M	753.86 M	1.87 M
12	Jawa Timur	7724	4.96 T	3.62 T	420.42 M	9.01 T	1.16 M
13	Kalimantan Barat	1977	1.24 T	956.74 M	39.77 M	2.23 T	1.13 M
14	Kalimantan Tengah	1434	904.37 M	970.11 M	26.61 M	1.9 T	1.32 M
15	Kalimantan Selatan	1866	1.12 T	937.58 M	31.04 M	2.09 T	1.12 M

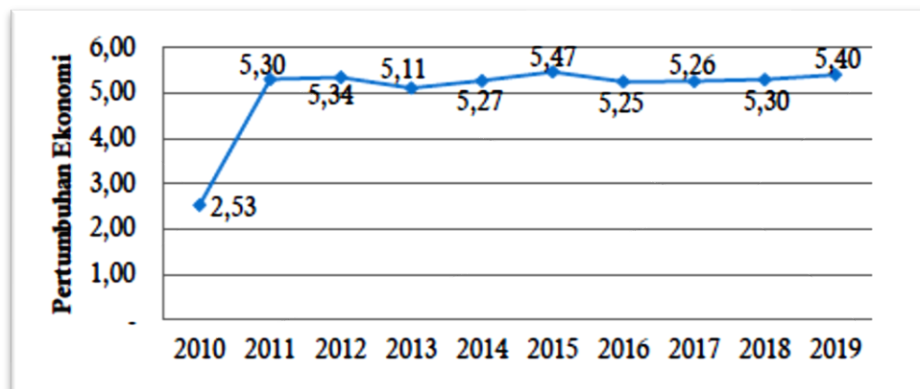
No	Provinsi	Jumlah Desa	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bagian Hasil PDRB	Jumlah	Jumlah Dana Per Desa
16	Kalimantan Timur	836	416.26 M	1.43 T	23.75 M	1.99 T	2.38 M
17	Sulawesi Utara	1505	677.49 M	577.61 M	22.26 M	1.51 T	1 M
18	Sulawesi Tengah	1842	1.89 T	775.7 M	26.4 M	1.92 T	1.04 M
19	Sulawesi Selatan	2253	1.42 T	1.43 T	105.18 M	2.96 T	1.31 M
20	Sulawesi Tenggara	1846	1.12 T	759.65 M	15.59 M	1.9 T	1.03 M
21	Bali	636	416.26 M	625.3 M	413.76 M	1.45 T	2.28 M
22	NTB	995	677.49 M	659.02 M	48.12 M	1.38 T	1.39 M
23	NTT	2995	1.89 T	1.12 T	36.96 M	3.01 T	1 M
24	Maluku	1198	754.63 M	651.85 M	25.13 M	1.43 T	1.19 M
25	Papua	5419	3.38 T	2.33 T	67.69 M	5.79 T	1.06 M
26	Maluku Utara	1064	653.45 M	478.42 M	17.17 M	1.14 T	1.07 M
27	Banten	1238	791.25 M	495.27 M	156.66 M	1.44 T	1.16 M
28	Bangka Belitung	309	206.29 M	331.82 M	23.13 M	561.25 M	1.81 M
29	Gorontalo	657	403.67 M	262.76 M	5.86 M	672.3 M	1.02 M
30	Kepulauan Riau	275	177.76 M	307.67 M	43.16 M	528.6 M	1.92 M
31	Papua Barat	1744	1.07 T	714.18 M	18.49 M	1.8 T	1.03 M
32	Sulawesi Barat	576	363.55 M	334.47 M	12.29 M	710.32 M	1.23 M
33	Kalimantan Utara	447	291.09 M	253.33 M	2.96 M	547.39 M	1.22 M
	Jumlah	74754	46.98 T	35.45 T	2.89 T	85.33T	1.15 T

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2016

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah menerima dana desa lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain Di Indonesia, karena provinsi Jawa Tengah memiliki lebih banyak desa, otomatis mendapat bagian yang lebih besar dari dana desa. Ada tiga jenis dana yang diarahkan ke desa, yaitu DD (dana desa), ADD (penyaluran dana desa) dan PDRD (pajak kabupaten dan bunga kabupaten). sepuluh persen) dari dana perimbangan kabupaten/kota setelah dikurangi DAK (dana khusus). Dalam hal ini, apabila

kabupaten/kota tidak menyalurkan dana desa kepada masing-masing desa, negara dapat mengubah dan/atau mengurangi dana tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2010-2019 (Persen)



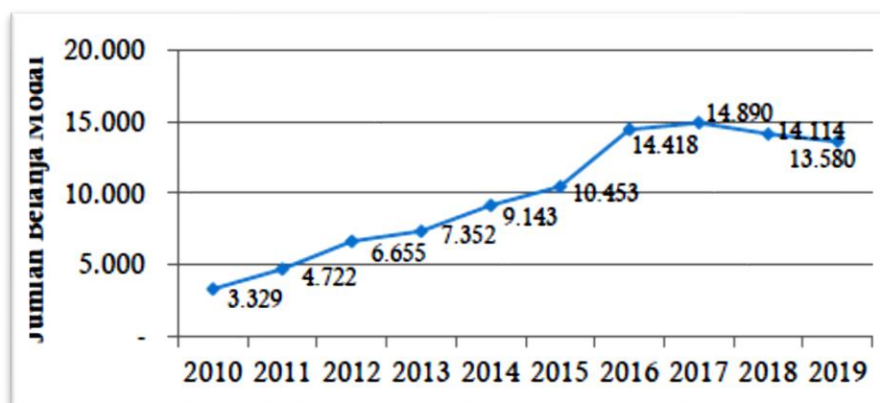
Sumber : BPS Jawa Tengah 2019

Pada grafik di atas menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah bervariasi, dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 5,47 persen dan terendah sebesar 2,53 persen di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010. Pertumbuhan Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan. Belum selesai. meningkat sebesar 6 persen. Kondisi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah terkait dengan wilayah perkotaan sangat berbeda-beda, ada

beberapa kota yang pertumbuhannya ekonominya mengalami percepatan setiap tahunnya, ada yang mengalami pertumbuhan yang berbeda setiap tahunnya dan ada juga yang mengalami penurunan.

Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah 2010-2019

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.



Sumber : Bps Jawa tengah 2015

Dari Grafik terlihat bahwa realisasi investasi meningkat dalam 8 tahun terakhir yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, namun mengalami penurunan di tahun 2019 dengan selisih Rp776 miliar dan terus menurun di tahun 2018 dengan selisih Rp534 miliar. Belanja modal dalam pembangunan daerah diharapkan dapat memanfaatkan potensi sumber daya pendukung perkantoran dan infrastruktur untuk merevitalisasi perekonomian. Nurmainah (2013) Kebijakan investasi mempengaruhi kinerja perekonomian masing-masing daerah. Secara umum, investasi publik bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana

guna meningkatkan intensitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat perempuan (2014).

Kemiskinan Jawa Tengah

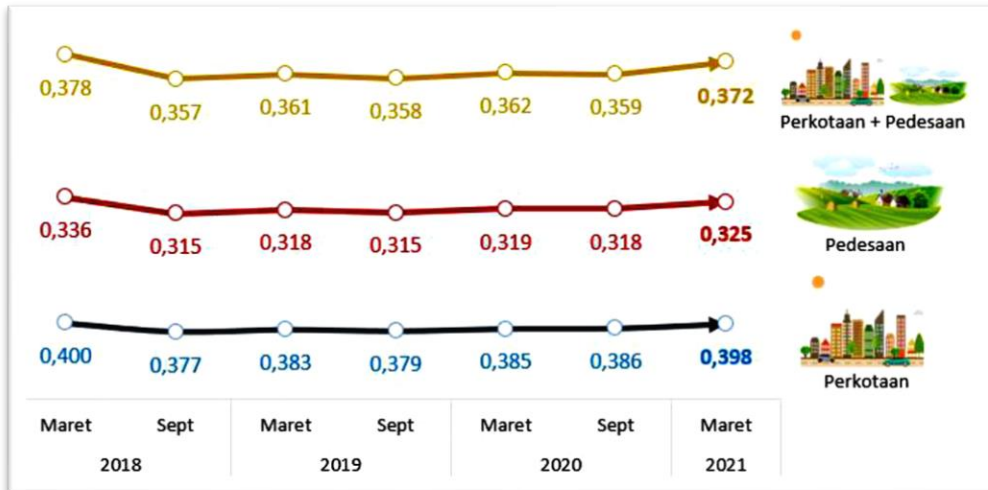


Sumber : BPS Jateng diolah, Juni 2021.

Grafik di atas menunjukkan bahwa itu adalah 11,79%, turun 0,05% dari September 2020 menjadi 11,84, 0,38 poin persentase dari 11,41% pada Maret 2020. Angka ini lebih tinggi dari Proporsi penduduk miskin terbaru di seluruh negeri. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebanyak 4,11 juta orang, berkurang 10,18 ribu orang dibandingkan September 2020 yang berjumlah 4,12 juta orang. Kemiskinan dikendalikan oleh orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Secara umum, kemiskinan pedesaan masih lebih tinggi daripada kemiskinan perkotaan. Antara September 2020 dan Maret 2021, kemiskinan perkotaan meningkat sebesar 0,01 poin persentase, sedangkan kemiskinan pedesaan menurun sebesar 0,13 poin persentase. Namun, antara Maret 2020 dan Maret 2021, wilayah perkotaan tumbuh sebesar 0,49 poin persentase dan wilayah pedesaan sebesar 0,27 poin persentase. Program bantuan sosial negara dan daerah sangat bermanfaat bagi warga, khususnya masyarakat lokal,

untuk “mengurangi” kemiskinan. Selain angka kemiskinan, kesejahteraan juga dapat diukur dengan menggunakan indeks rasio gini.

Perkembangan indeks gini jawa tengah



Sumber : BPS Jateng, diolah, Juni 2021.

Pada bulan Maret 2021, ketimpangan penduduk Jawa Tengah yang diukur dengan rasio gini sebesar 0,372. Angka tersebut 0,013 poin persentase di atas rasio gini September 2020 sebesar 0,359 dan 0,010 poin persentase di atas rasio gini Maret 2020 (0,362). Dengan kata lain, ketimpangan meningkat antara September 2020 dan Maret 2021.

Pada Al-Qur'an Surah Al-Ahqaf ayat 19 dijelaskan bahwa Allah SWT akan membalas pekerjaan orang sesuai dengan apa yang dikerjakannya Ayat tersebut berbunyi:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.”* Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah akan membalas setiap perbuatan manusia selama di bumi sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Jika yang dilakukan merupakan pekerjaan yang baik dan menciptakan kebaikan bagi instansi atau organisasinya maka hasil yang diperolehpun juga baik dan memberikan keuntungan bagi instansinya. Begitu pula sebaliknya jika yang dilakukan adalah pekerjaan buruk maka hasil yang diterima pun juga buruk dan mendatangkan kerugian. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL PERTUMBUHAN EKONOMI TINGKAT KEMISKINAN DAN INDEKS GINI TERHADAP ALOKASI DANA DESA JAWA TENGAH 2011-2021”**.

1.2 Batasan Masalah

Pada Batasan masalah Analisis pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan indeks gini terhadap alokasi dana desa dengan mengambil subjek lokasi kabupaten Jawa Tengah yang berjumlah 29 kabupaten dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, belanja modal, serta ketimpangan yang di gunakan yakni tahun 2011-2021.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah belanja modal mempengaruhi alokasi dana desa pada kabupaten di Provinsi Jawa Tengah?

2. Apakah tingkat pertumbuhan ekonomi mempengaruhi alokasi dana desa pada kabupaten di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah kemiskinan mempengaruhi alokasi dana desa pada kabupaten di Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah indeks gini mempengaruhi alokasi dana desa pada kabupaten di Provinsi Jawa Tengah?

1.4 Tujuan Penelitian

Pada perumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk Mengidentifikasi apakah belanja modal mempengaruhi alokasi dana desa di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk Mengidentifikasi apakah tingkat pertumbuhan ekonomi mempengaruhi alokasi dana desa di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk Mengidentifikasi apakah kemiskinan mempengaruhi alokasi dana desa di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk Mengidentifikasi apakah indeks gini mempengaruhi alokasi dana desa di Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka peneliti berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diinginkan adalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian ruang lingkup yang sama
2. Manfaat Teoretis, Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai Alokasi Dana Desa dan ketimpangan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.